

Pengembangan Sektor Tambak Udang Berkelanjutan dalam Perspektif *Collaborative Governance*: Studi Kasus Desa Teluk Limau

Rianti Sintia Sari

Universitas Bangka Belitung, Indonesia
Corresponding author: tiaparit@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas dinamika pengembangan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau, Kabupaten Bangka Barat, dalam perspektif collaborative governance. Penelitian bertujuan menganalisis proses kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan tambak udang serta dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tambak udang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan lingkungan, seperti pencemaran limbah dan perubahan fungsi lahan pesisir. Proses collaborative governance terlihat melalui keterlibatan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun komunikasi, kepercayaan, serta komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan pesisir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan sektor tambak udang memerlukan pengawasan, transparansi, dan kerja sama antaraktor agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga.

Kata Kunci: collaborative governance, tambak udang, wilayah pesisir, pembangunan berkelanjutan.

Abstract. This study discusses the dynamics of shrimp pond sector development in Teluk Limau Village, West Bangka Regency, from the perspective of collaborative governance. The research aims to analyze the collaborative process among stakeholders in shrimp pond management and its impact on the social, economic, and environmental conditions of coastal communities. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observations, and documentation. The results show that the development of shrimp ponds has positively contributed to economic improvement and created new employment opportunities for local communities. However, it has also caused environmental problems, such as waste pollution and changes in coastal land use. The collaborative governance process is reflected in the involvement of government, companies, and communities in building communication, trust, and shared commitment in coastal management. This study concludes that the sustainability of the shrimp pond sector requires supervision, transparency, and cooperation among stakeholders to maintain a balance between economic interests and environmental sustainability.

Keywords: collaborative governance, shrimp ponds, coastal areas, sustainable development.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat panjang dan potensi sumber daya pesisir yang besar. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem laut (Fiansi et al., 2025). Indonesia adalah salah satu negara dengan produsen perikanan terbesar di dunia karena keunggulannya sebagai negara maritim (Akbar, 2022). Kondisi tersebut menjadikan wilayah pesisir sebagai kawasan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Salah satu sektor yang berkembang di wilayah pesisir adalah budidaya tambak udang (Caniago et al., 2020). Komoditas udang menjadi salah satu produk perikanan unggulan karena memiliki nilai ekonomi tinggi serta permintaan pasar yang terus meningkat (Mashari et al., 2019). Udang menjadi salah satu komoditas sektor unggulan

karena perminatan dari pasar internasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian, karna kondisi itu semakin mendorong pemerintah dan para pelaku usaha untuk mengembangkan budidaya udang sebagai dari bagian pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional (Latifah et al., 2025).

Perkembangan teknologi budidaya turut menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan sektor tambak udang. Masuknya sistem budidaya udang *Vaname* yang memiliki tingkat produktivitas tinggi yang membuat banyak wilayah pesisir mulai beralih memanfaatkan lahan pantai menjadi kawasan tambak. Jenis udang *Vaname* dipilih untuk dibudidayakan karna ada nilai keuntungan yang didapat, diantaranya udang *Vaname* memiliki ketahanan terhadap penyakit, cepat panen, produktivitas tinggi, ketersediaan benur yang sangat melimpah dan memiliki peminat pasar yang luas (Sianturi & Maniko, 2023). Karna itu menjadikan sektor tambak udang semakin diminati oleh investor maupun masyarakat lokal sebagai sumber penghasilan baru di wilayah pesisir. Perubahan ini menunjukan bahwa kawasan pesisir tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang tangkap nelayan tradisional, tetapi mulai berkembang menjadi kawasan produksi ekonomi berbasis budidaya perikanan.

Desa Teluk Limau adalah salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi budidaya tambak udang dengan lokasi yang strategis. Akses jalan yang dapat di tempuh melalui jalur darat dengan waktu sekitar $\pm 2,5$ jam tidak jauh dari pusat Kabupaten Bangka Barat. Kondisi perairan Pantai Desa Teluk Limau cukup tenang dengan tata letaknya yang mudah diakses, serta cenderung datar dan lahannya yang mengarah ke bukit Pala (Ahmad, 2019). Karakteristik geografis desa ini menambah minat para investor untuk berinvestasi di sektor budidaya komoditas udang. Perkembangan sektor tambak udang berawal dari masuknya investasi budidaya tambak udang yang memanfaatkan potensi geografis wilayah pesisir tersebut. Pada awalnya, masyarakat di Desa Teluk Limau lebih banyak menggantungkan hidup pada aktivitas nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut secara tradisional. Kemudian, seiring berkembangnya investasi tambak udang, mulai terjadi perubahan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Sebagian masyarakat mulai terlibat sebagai pekerja tambak, buruh harian, maupun aktivitas ekonomi lain yang berkaitan dengan sesi operasional budidaya tambak udang. Perkembangan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau menunjukan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran tambak udang tidak hanya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir saja, tetapi juga mendorong perubahan terhadap pola pemanfaatan ruang di wilayah pesisir (Ahmad, 2019).

Kehadiran sektor tambak udang pada awalnya dipandang mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sektor tambak udang berkembang sangat pesat dan mendapat perhatian dari pemerintah daerah sebagai salah satu sektor yang berpotensi dalam mendukung pembangunan ekonomi wilayah pesisir. Namun, di balik pertumbuhan sektor tambak udang yang di anggap mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, dari perkembangan itu juga menghadirkan berbagai persoalan ekologis dan sosial. Ekspansi tambak udang pada wilayah pesisir sering kali terjadi perubahan fungsi lahan secara besar - besaran (Shulhan, 2021). Menurut Alongi (2015), perkembangan sektor tambak udang di kawasan pesisir Asia Tenggara menjadi salah satu faktor utama terjadinya perubahan fungsi lahan pesisir, terutama melalui konversi ekosistem mangrove menjadi area budidaya tambak udang.

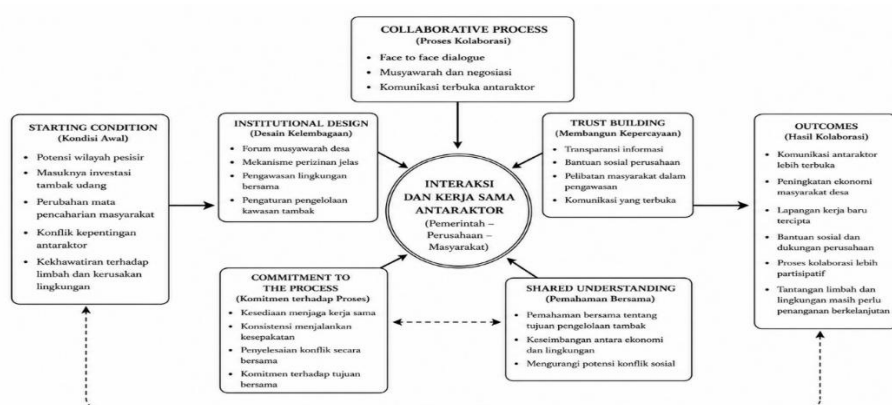
Persoalan lainnya muncul dari aktivitas budidaya tambak yang menghasilkan limbah organik maupun kimia dalam jumlah besar, akibat tingginya perminatan udang menyebabkan peningkatan produksi dan penggunaan pakan yang berlebih, kemudian dari sanalah terciptanya pencemaran. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan disebabkan oleh limbah pakan dan dari kotoran udang tersebut. Limbah iyalah salah satu pemicu terjadinya pencemaran lingkungan yang nantinya menurunkan kualitas lingkungan (Fitriani & Hariyanto, 2020). Perkembangan usaha tambak udang mendorong pemanfaatan wilayah pesisir secara lebih intensif. Oleh karena itu, perkembangan sektor tambak udang tidak hanya dapat dipahami sebagai proses pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai dinamika perubahan sosial, lingkungan dan tata kelola wilayah pesisir yang melibatkan banyak kepentingan antaraktor. Lalu dari kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dinamika pengembangan sektor tambak udang berlangsung di Desa Teluk Limau, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan pesisir, serta bagaimana strategi pengembangan berkelanjutan dapat diterapkan agar sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *collaborative governance* dari Chris Ansell & Alison Gash (2008) sebagai pola analisis untuk melihat dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan budidaya tambak udang di Desa Teluk Limau. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan Keputusan, penyelesaian konflik, dan penyusunan strategi Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kawasan tambak udang di Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika pengembangan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau serta dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual terkait perkembangan tambak udang serta strategi pengembangan berkelanjutan yang diterapkan. Penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih mengetahui dan terlibat langsung dalam aktivitas tambak udang. Informan penelitian adalah pegawai Kantor Desa; tokoh masyarakat; nelayan dan kelompok ibu – ibu rumah tangga yang terdampak. Wawancara dilakukan menggunakan panduan semi-struktur kepada 7 (tujuh) orang warga dan aparat desa yang memiliki peran atau terdampak dari keberadaan tambak udang di Desa ini. Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan hasil observasi dan dokumentasi dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1: *Collaborative Governance in Theory and Practice* Chris Ansell Alison Gash

Gambar diatas Menunjukkan kerangka konseptual penelitian yang di adaptasi dari Chris Ansell & Alison Gash (2008). Penelitian ini secara spesifik menganalisis tiga elemen dalam tata kelola kolaboratif tambak udang. Pertama, *strating condition* berupa potensi wilayah pesisir dan kepentingan antaraktor. Kedua, efektivitas institusional desain melalui forum musyawarah desa dan mekanisme perizinan dalam memfasilitasi *trust building* antaraktor. Ketiga, pencapaian outcomes dapat dilihat dari dua indikator: peningkatan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan limbah. Ketiga elemen ini yang kemudian menjadi pisau analisis utama dalam penelitian.

Starting Condition (Kondisi Awal)

Wilayah pesisir dan laut memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan bagi penduduk Indonesia. Kedua wilayah ini diperkirakan akan menjadi landasan pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Pembangunan sektor perikanan dan kelautan juga menjadi bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk setiap kegiatan perikanan dan kelautan dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik itu dalam kegiatan produksi maupun pengelolaan serta pemasaran (Nuriansyah & Maulana, 2023). Diantara komoditas sektor perikanan yang memiliki daya tarik pasar dan ekonomi tinggi di berbagai negara secara luas dan cenderung meningkat ialah sektor tambak udang terutama udang jenis *Vaname*. Salah satu produk dari perikanan air tawar yang saat ini sangat marak dibudidayakan (Khairil & Frinaldi, 2023). Sektor tambak udang yang ada di Desa Teluk Limau semakin menunjukkan adanya perubahan pola pemanfaatan wilayah pesisir yang semakin berkembang pesat (Notonegoro & Priyambada, 2023). Keberadaan wilayah pesisir yang memiliki akses terhadap sumber daya laut serta kondisi geografis yang juga turut mendukung menjadikan Desa Teluk Limau dipandang strategis untuk pengembangan usaha budidaya udang (Ahmad, 2019). Namun, dari sana memperlihatkan perkembangannya sejak awal tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, melainkan menimbulkan perosalam ekologis dan sosial (Jelibседа & Umar, 2025). Ekspansi tambak udang di

kawasan pesisir memunculkan kekhawatiran Masyarakat terhadap perubahan fungsi lahan di area pesisir Pantai, terutama yang berkaitan dengan kualitas air laut, pencemaran yang disebabkan oleh limbah tambak yang mengakibatkan terganggunya aktivitas nelayan tradisional (Soken et al., 2025). Hal ini menjadi semakin panas karena Masyarakat Desa Teluk Limau masih sangat bergantung kepada sumber daya laut sebagai mana pencaharian utamanya.

Perseteruan antara masyarakat lokal yang terdampak dengan para aktor yang ada dibalik ini semua tidak hanya mencakup masalah lingkungan saja, tapi dengan adanya perbedaan kepentingan antar aktor. Pemerintah daerah melihat sektor tambak udang sebagai peluang peningkatan investasi dan pastinya untuk pertumbuhan ekonomi daerah, disisi lain para pelaku usaha cenderung mengarahkan pada produktivitas dan keuntungan usaha (Kurniawan, 2026). Lain halnya dengan masyarakat pesisir yang lebih menekankan tentang keberlanjutan lingkungan dan keamanan ruang hidup mereka saat ini. Meskipun memiliki kepentingan yang berbeda, masing-masing aktor tetap mempunyai insentif untuk terlibat dalam proses kolaborasi. Pemerintah daerah berkepentingan menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir, pelaku usaha membutuhkan legitimasi sosial serta keberlanjutan usaha budidaya tambak, sedangkan masyarakat pesisir memiliki kepentingan untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Adanya kepentingan bersama tersebut menjadi dorongan awal terbentuknya kerja sama antaraktor dalam pengelolaan kawasan pesisir. Kepentingan tersebut menjadi faktor awal yang mengakibatkan potensi munculnya konflik apabila tidak diatur melalui mekanisme kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative Process

Proses kolaborasi ini menjadi inti dari semua proses tata kelola. Proses kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan berbagai aktor dalam suatu kebijakan, tetapi sebagai proses interaksi yang dibangun melalui dialog, kepercayaan, komitmen dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati (Susilowati et al., 2022). Melalui teori *Collaborative governance* di peruntukan untuk memproses permasalahan publik melalui kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, dan diharapkan keterlibatannya dapat membantu penanganan permasalahan menjadi lebih efektif. Sehingga hubungan kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana dapat dianggap sebagai suatu bentuk proses kolaboratif (Vandayani, 2022). Dalam pengembangan sektor tambak udang yang ada di desa Teluk Limau, proses kolaboratif ini kemudian menjadi penting karena pengelolaan kawasan pesisir melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Proses kolaborasi yang terjadi di desa Teluk Limau, diawali melalui upaya dengan mempertemukan berbagai pihak yang akan terlibat dalam pengembangan sektor tambak udang. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan kepentingan Pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pelaku usaha berusaha menjalankan aktivitas budidaya untuk menambah produktivitas, sedangkan masyarakat pesisir memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dari perbedaan ini, kepentingan tersebut menjadikan proses kolaboratif penting untuk mencegah dominasi aktor tertentu dalam pengelolaan kawasan pesisir (Wafi, A., & Ariadi, H. 2026).

Institutional design

Menurut teori *collaborative governance* Chris Ansell & Alison Gash (2008), ada unsur penting yang menjadi bagian dari *Collaborative process, institutional design* atau desain kelembagaan. Design mengarah kepada aturan, mekanisme, dan struktur yang mengatur proses kolaborasi agar berjalan secara terbuka dan partisipatif. Keberadaan forum kolaboratif yang dibentuk dalam desain kelembagaan menjadi ruang interaksi antaraktor dalam membangun komunikasi secara langsung. Proses ini menunjukkan adanya *face-to-face dialogue* yang memungkinkan para pihak mendiskusikan persoalan pengelolaan tambak udang secara bersama-sama. Dalam persoalan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau, desain kelembagaan dapat dilihat melalui keterlibatan pemerintah desa, pemerintah daerah, instansi lingkungan, perusahaan, dan masyarakat dalam mekanisme pengelolaan tambak. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan secara langsung, kejelasan mengenai prosedur perizinan, forum musyawarah, pengawasan lingkungan (Rahman et al., 2025) dan mekanisme penyampaian yang menjadikan hal ini penting agar seluruh pihak berperan dalam mengurangi ketimpangan kekuasaan yang sebelumnya muncul pada kondisi awal (*starting conditions*).

Trust Building

Trust building atau pembangunan kepercayaan turut menjadi unsur penting di dalam proses

kolaborasi. Ansell & Gash (2008) mengatakan bahwa kepercayaan itu tidak muncul secara instan, tetapi dibangun melalui interaksi yang terus berulang, komunikasi yang dilakukan secara terbuka, dan keterlibatan yang konsisten dari berbagai aktor. pembangunan kepercayaan merupakan proses penting dalam menciptakan hubungan kerja sama antaraktor. Kepercayaan menjadi dasar utama agar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dapat bekerja bersama dalam menyelesaikan persoalan publik. Dalam bagian ini, pembangunan kepercayaan menjadi tantangan tersendiri karena adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak aktivitas tambak kepada lingkungan pesisir, tentang persoalan limbah, perubahan kualitas air, dan juga gangguan terhadap aktivitas nelayan. Masyarakat akan percaya kepada pemerintah ketika aspirasi mereka benar-benar didengar dalam pengelolaan kawasan tambak. Oleh karena itu, kepercayaan perlu dibangun melalui transparansi informasi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, serta forum komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung (Rahman et al., 2025). Dengan adanya kepercayaan, proses kolaborasi akan lebih mudah berjalan karena setiap pihak merasa dilibatkan dan dihargai dalam pengelolaan kawasan pesisir. Didalam proses pengembangan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau, para pihak perusahaan juga melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat desa dalam bentuk bantuan atau kontribusi sosial. Bentuk kontribusi tersebut diantaranya berupa bantuan pembangunan beberapa fasilitas, penyaluran PLN kepada masjid yang berlokasi tak jauh dari sektor tambak, murahnya harga udang, serta pemberian bantuan dana terhadap kegiatan-kegiatan hari besar yang akan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Dalam perspektif *collaborative governance*, keterlibatan sektor perusahaan tambak melalui bantuan sosial kepada masyarakat dapat diartikan sebagai bagian dari *Trust building* atau proses pembangunan kepercayaan antaraktor. Dalam pandangan Ansell dan Gash (2008) juga menggambarkan bahwa kepercayaan menjadi unsur penting didalam kolaborasi karena mampu menciptakan hubungan kerja sama yang lebih stabil antaraktor. Melalui kontribusi sosial ini, perusahaan berupaya menunjukkan keterlibatannya dan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat sekitar kawasan tambak.

Commitment to the Process

Dalam proses pengelolaan sektor tambak udang dikawasan pesisir, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan berbagai aktor, tetapi juga tentang sejauh mana para pihak memiliki komitmen untuk menjalankan proses kerja sama secara berkelanjutan. Dalam teori *collaborative governance*, komitmen terhadap proses menjadi elemen penting karena menunjukkan kesediaan aktor untuk tetap terlibat, membangun kerja sama, serta mempertahankan hubungan kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya komitmen yang kuat, proses kolaborasi akan susah untuk berjalan karena pada masing-masing aktor lebih tertuju kepada kepentingan pribadi (Ansell & Gash, 2008). Namun, membangun suatu komitmen itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk di jalankan. Adanya perbedaan kepentingan antar para aktor sering kali menjadi tantangan dalam mempertahankan komitmen kolaborasi. Pemerintah cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, perusahaan yang tertuju kepada produktivitas usaha, sementara masyarakat lebih memetingkan untuk masa yang akan datang bagi keberlanjutan kehidupan mereka. Jika hal ini tidak bisa dijadikan satu arahan yang sama maka akan sulit di jalankan, komunikasi yang terbuka dan mekanisme penyelesaian masalah dengan baik, maka komitmen terhadap proses kolaborasi dapat melemah dan akan memunculkan konflik baru (Bila & Saputra, 2019).

Shared Understanding

Shared Understanding merupakan kondisi ketika para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi memiliki pemahaman, tujuan, dan visi bersama terhadap persoalan yang akan di hadapi. *Shared Understanding* menjadi penting karena proses kolaborasi tidak akan berjalan mulus apabila masing-masing dari pihak yang bersangkutan masih ingin mempertahankan ego sektoral dan perbedaan prinsip terhadap tujuan pengelolaan bersama (Maharashtri et al., 2023). Pada bagian ini, konteks *Shared Understanding* dapat dipahami sebagai bentuk upaya menyatukan pandangan antar aktor semua yang termasuk kedalam kolaborasi ini. Pada awal perkembangan sektor tambak udang, setiap sektor cenderung memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang apabila tidak di kelola dengan baik maka akan memunculkan konflik baru. Selain itu, *Shared Understanding* juga penting untuk membangun rasa saling memiliki (*sense of ownership*) terhadap kebijakan yang telah dihasilkan melalui proses kolaborasi (Sartika, 2024). Ketika seluruh aktor merasa bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Dalam pengelolaan tambak, kondisi ini dapat membantu mengurangi potensi konflik sosial antara masyarakat, pemerintah, dan sektor tambak. Dengan itu semua, istilah *Shared Understanding* pada sektor tambak udang yang ada di Desa Teluk Limau

menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya bergantung pada keterlibatan banyak aktor, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak yang terlibat dalam membangun visi dan tujuan bersama terkait pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan untuk mencapai *common goals* sebagai fondasi kolaborasi (Fitri et al., 2021).

Outcomes

Outcomes atau hasil kolaborasi merupakan bentuk pencapaian yang muncul dari proses kerja sama antaraktor dalam menyelesaikan persoalan publik. Outcomes tidak hanya dipahami sebagai keberhasilan pembangunan secara fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta terciptanya mekanisme kerja sama yang lebih terkoordinasi antar pihak yang terlibat (Ansell & Gash, 2008). Pada bagian pengembangan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau, hasil kolaborasi dapat dilihat melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan dalam menjaga keberlangsungan aktivitas tambak serta meminimalisir konflik yang muncul di kawasan pesisir.

Salah satu outcomes yang terlihat dari proses kolaborasi tersebut adalah terbukanya ruang komunikasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun pemerintah desa. Melalui forum musyawarah, penyampaian aspirasi masyarakat, dan keterlibatan pemerintah dalam proses pengelolaan kawasan tambak, masyarakat mulai memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan maupun harapan mereka terkait aktivitas budidaya tambak udang. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* mampu menciptakan hubungan yang lebih terbuka dibandingkan kondisi awal ketika masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Fitri et al., 2021).

Selain itu, keberadaan sektor tambak udang juga memberikan outcomes dalam bentuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kehadiran tambak membuka lapangan pekerjaan baru bagi sebagian masyarakat pesisir, baik sebagai pekerja tambak, tenaga operasional, maupun aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Perputaran ekonomi lokal yang meningkat turut memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan pesisir (Shulhan et al., 2021). Dalam beberapa kondisi, pihak perusahaan juga memberikan bantuan sosial kepada para masyarakat desa seperti bantuan pembangunan fasilitas umum, bantuan kegiatan masyarakat, serta dukungan terhadap kebutuhan sosial desa lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang mulai terbuka antar sektor dan masyarakat desa.

Namun, outcomes dari hasil proses kolaborasi di Desa Teluk Limau belum sepenuhnya berjalan optimal. Karena, masih terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap dampak ke lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tambak udang, terutama yang berkaitan dengan masalah limbah, kualitas air lautnya, serta perubahan ekosistem pesisir. Persoalan limbah tambak yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan sektor budidaya udang (Fitriani & Hariyanto, 2020). Perbedaan kepentingan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat juga masih menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Oleh karena itu, outcomes dalam pemahaman teori *collaborative governance* tidak hanya diartikan sebagai hasil akhir yang sepenuhnya berhasil, tetapi juga sebagai proses keberlanjutan dalam membangun kesinambungan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan pesisir. Dengan begini, outcomes dari sudut pandang teori *collaborative governance* pada bagian pengembangan sektor tambak udang yang ada di Desa Teluk Limau menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah menciptakan hubungan kerja sama antaraktor yang lebih terbuka dan partisipatif. Meskipun demikian, keberhasilan kolaborasi ini tetap memerlukan komitmen bersama, transparansi, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pengelolaan kawasan pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang (Ansell & Gash, 2008).

KESIMPULAN

Perkembangan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau menunjukkan adanya perubahan besar dalam pemanfaatan wilayah pesisir dari aktivitas nelayan tradisional menuju kawasan budidaya ekonomi berbasis tambak udang. Perkembangan sektor tambak udang di Desa Teluk Limau memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa, tetapi juga menimbulkan persoalan lingkungan seperti limbah tambak dan perubahan kualitas air di wilayah pesisir. Melalui pendekatan *collaborative governance*, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan tambak udang. Proses kolaborasi yang dibangun melalui komunikasi,

kepercayaan, dan partisipasi masyarakat mampu menciptakan hubungan yang lebih terbuka antaraktor, meskipun masih terdapat tantangan didalam menyatukan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan pengawasan berkelanjutan agar pengembangan tambak udang dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik maupun kerusakan lingkungan dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. G. (2019). Desk study lokasi rencana pengembangan budidaya tambak udang di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.
- Akbar, I. (2022). Literature review pemanfaatan sumber daya kelautan untuk sustainable development goals (SDGS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1).
- Alongi, D.M. (2015). The Impact of Climate Change on Mangrove Forests. *Current Climate Change Reports*
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196-210.
- Chaniago, A. B. (2020). Analisis Kesesuaian Kawasan Tambak Udang Vamane (*Litopenaeus vannamei*) di Desa Pasar Bembah Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Penelitian dan Pengelolaan Sumaber Daya Alam dan Lingkungan*, 9(1), 33-42.
- Dewi, D. F. K., & Frinaldi, A. (2023). The effect of vaname shrimp pond waste disposal (*Litopenaeus van-namei*) on the environment and environmental law perspective: A literatur review. *Journal of Climate Change Society*, 1(2), 98-103.
- Fitri, T. N., Adnan, M. F., & Syamsir. (2021). Implementasi Collaborative Governance di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5).
- Fitriani, W., & Hariyanto, B. (2020). Dampak pembuangan limbah industri pengolahan udang terhadap kualitas air di aliran Sungai Kecing Desa Cebolek Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. *Swara Bhumi*, 2(1).
- Jelibседа, J., & Umar, G. (2025). Dinamika Sosial-Ekologis dan Tantangan Pembangunan di Kawasan Pesisir Terdegradasi: Kajian Kasus di Teluk Jakarta. *Trends in Applied Sciences, Social Science, and Education*, 3(1), 1-12.
- Laheng, S., Putri, I. W., Putri, D. U., & Idris, S. (2025). Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan dan Program Mangrove Berkelanjutan. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*, 3(3), 110-114.
- Latifah, A. L., Revaldi, M., & Destianty, M. N. (2025). PERAN UDANG VANAME DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING EKSPOR PERIKANAN INDONESIA DI PASAR GLOBAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 319-325.
- Mashari, S., Nurmalina, R., & Suharno, S. (2019). Dinamika daya saing ekspor udang beku dan olahan Indonesia di pasar internasional. *Journal of Indonesian Agribusiness*, 7(1), 37-52.
- Notonegoro, H., & Priyambada, A. (2023). Evaluasi Mutu Kualitas Air Kolam IPAL Tambak Udang Skala Rakyat Desa Kurau Barat, Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Enggano*, 8(2), 172-180
- Nuriansyah, M., & Maulana, H. A. (2023, November). Studi Deskriptif Analisis Kelayakan Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) Di Tempat Plastik Desa Teluk Pambang. In *International Conference on Industrial Technology and Business (INTECHBIZ)* (pp. 617-627).
- Rahman, S. A., Syamsul, S., Fatmawati, F., Zarnuji, Z., & Santosa, R. (2025). Penerapan Convergence Model dalam Penyusunan Kebijakan Petani Tambak Udang di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Sumenep. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 11(1), 1419-1426.
- Sartika, I. (2024). Collaborative Governance Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 209-233.
- Sianturi, I. T., & Maniko, A. P. (2023). Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus vanammei*) yang Dibudidayakan secara Semi Intensif di TEFA Poltek KP Kupang. *Jurnal Salamata*, 5(2), 68-71.
- Soken, I. G. M., Sumantra, I. K., Wiryawan, I. W. G., & Arnawa, I. K. (2025). Beban Pencemaran Limbah Tambak Udang terhadap Perairan Pesisir di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Jurnal Alam Lestari*, 10(2), 71-81.
- Shulhan, S. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Budidaya Tambak Udang. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 1(1), 147-158.

- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Fadhlia, M. N. (2022). Analisis collaborative governance dalam penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Desa Sungai Rambutan. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(2), 96-111.
- Vandayani, D. S.; A. W. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan)*.
- Wafi, A., & Ariadi, H. (2026). Pelatihan Penerapan Good Aquaculture Practice (GAP) bagi Petambak Udang di Pesisir Situbondo. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 517-526.
- Witomo, C. M. (2018). Dampak budi daya tambak udang terhadap ekosistem mangrove. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 4(2), 75-85